

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU**

**PERANAN BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (KESBANGPOLINMAS)
PROVINSI RIAU DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN
TERHADAP LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)
DI PROVINSI RIAU TAHUN 2011**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Pada
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau - Pekanbaru**



OLEH :

S Y A F E I
NIM.0701112800

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2013**

**PERANAN BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (KESBANGPOLINMAS) PROVINSI
RIAU DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP LEMBAGA
SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DI PROVINSI RIAU TAHUN 2011**

Oleh: Syafei

NIM. 0701112800

(Email: syafei.piitosca@yahoo.com)

ABSTRACT

This Research would like to see the role of Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Riau Province in guidance toward NGO of Riau Province. Later appeared a negative image on the existence of NGOs in society. This negative image is obtained because some people report that shows that many people set up an NGO is only used as a guise for profit alone. Therefore, as for the problems inherent in this research is how the role of National Unity and Community Protection Politics in Riau province to guide the scope of NGOs in Riau Province and the obstacles faced and the Politics of National Unity Agency Public Protection Riau Province in doing guidance on the scope of the NGOs in the province of Riau Province? This research is qualitative, then for descriptive data analysis presented in the form of analysis. Data were collected through informants, key informants and data from the field. Once the necessary data is collected, the authors further separating and classifying the data according to its kind. The data obtained in the field combined with data obtained through informants, then the final conclusions drawn from these data.

Kata Kunci : Peranan dan Pembinaan LSM

Pendahuluan

Provinsi Riau sebagai salah satu bagian dari wilayah Negara Indonesia juga mengalami perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat sebagai bentuk pengejawantahan terhadap demokratisasi di Daerah. Berbagai jenis organisasi masyarakat tumbuh dan berkembang dalam mengisi demokrasi di Daerah ini. Hal tersebut sangat dimungkinkan karena organisasi masyarakat merupakan salah satu jenis kelompok kepentingan ataupun kelompok penekan (*pressure group*) sebagaimana diketahui bahwa keberadaan kelompok kepentingan ataupun kelompok penekan dalam suatu sistem politik menjadi sangat vital sebagai alternatif penyaluran aspirasi masyarakat apabila mengalami kemandekan. Seperti yang dikatakan oleh Riza N. Arfani (1996: 32) bahwa aspirasi yang diperhatikan adalah kepentingan yang sudah diagregasi dan diartikulasi dalam satu kelompok. Salah satu bentuk dari kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM sebagai bagian dari kelompok kepentingan ataupun kelompok penekan, sejatinya juga memiliki posisi strategis dalam menjalankan fungsi tersebut. Keberadaan LSM sebenarnya lebih diarahkan untuk memberdayakan masyarakat. Wacana pemberdayaan masyarakat ini

muncul sebagai proses pembangunan Negara melalui arus bawah atau yang lebih dikenal *bottem up*.

Secara sederhana, LSM dapat diartikan sebagai sebuah organisasi atau kelompok yang dibentuk oleh masyarakat secara swadaya dan tidak mencari keuntungan. Namun istilah resmi LSM dikenal dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 8 tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Menurut Inmendagri tersebut, LSM adalah sebagai organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara sukarela.

Pada saat ini perkembangan LSM di Provinsi Riau sudah sedemikian pesatnya, terutama LSM yang lingkup kegiatannya provinsi. LSM lingkup provinsi menjadi sebuah kajian yang menarik karena luasnya lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sebuah LSM, ditambah lagi kelahiran LSM lingkup kabupaten/kota dan desa tidak terlepas dari peranan LSM lingkup Provinsi. Berikut penulis sampaikan data LSM lingkup provinsi di Provinsi Riau berdasarkan tahun pendaftaran;

Tabel 1.1
Data Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkup Provinsi di Provinsi Riau
Berdasarkan Tahun Pendaftaran (2009-2011)

| NO. | TAHUN PENDAFTARAN | JUMLAH |
|--------------|--------------------------|---------------|
| 1. | 2009 | 32 |
| 2. | 2010 | 59 |
| 3. | 2011 | 31 |
| TOTAL | | 122 |

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau

Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau merupakan salah satu lembaga pemerintah daerah provinsi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau. Badan ini dibentuk sebagai pendukung tugas Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan.

Pembentukan Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau sebagai upaya dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan umum Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan beberapa peraturan daerah sebagai landasan pembentukan perangkat daerah dengan mengacu kepada Peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai organisasi pemerintahan, Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur Riau selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Pembinaan yang dilakukan Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau dapat berupa bimbingan, pengayoman dan dorongan. Bimbingan yang dilakukan dengan cara memberi saran, anjuran, petunjuk, pengarahan, dan penyuluhan agar LSM dapat menjalankan kegiatan, profesi dan fungsinya dengan baik. Pemberian pengayoman dapat dilakukan dengan memberi perlindungan, rasa aman dan kemudahan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan dorongan berupa upaya-upaya pemberian motivasi agar LSM dapat tumbuh secara mandiri dengan menumbuhkan kreativitas yang positif untuk dapat mengembangkan diri. Selanjutnya pembinaan LSM dilaksanakan dalam bentuk komunikasi dan konsultasi secara timbal balik antara Pembina dengan LSM yang bersangkutan. Pelaksanaan komunikasi dan konsultasi dilakukan secara luwes baik atas inisiatif dari Pemerintah maupun dari LSM yang bersangkutan sesuai kebutuhan dan sejauh mungkin dapat meniadakan kendala-kendala yang menimbulkan kerugian kepentingan umum. Forum komunikasi dan konsultasi ini dapat berupa sarasehan, temu wicara, tatap muka silaturahmi, seminar dan sebagainya.

Berdasarkan Inmendagri Nomor 8 Tahun 1990 tentang pembinaan LSM, dapat disimpulkan bahwa inti dari sebuah pembinaan terhadap LSM adalah untuk mewujudkan pembangunan masyarakat daerah dalam upaya pencapaian tujuan nasional. Hal ini tentunya memperhatikan fungsi dan peran LSM tersebut lahir dan tumbuh ditengah-tengah masyarakat serta telah menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan pada era Reformasi. Sebagaimana disampaikan oleh Budi Winarno (2008: 45-46) peranan penting yang telah dimainkan dalam melakukan artikulasi kepentingan dan memberikan input yang berharga bagi sistem politik ketika struktur politik formal mengalami kemandegan dan gagal memainkan fungsi yang seharusnya dilaksanakan.

Belakangan muncul kesan negatif terhadap keberadaan LSM di tengah masyarakat. *Image negative* ini diperoleh karena adanya beberapa laporan masyarakat yang menunjukkan bahwa banyak orang mendirikan LSM hanya digunakan sebagai kedok untuk mencari keuntungan semata.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa belakangan ini sangat marak bermunculan LSM yang dibentuk oleh pejabat tetapi seolah mengusung misi atas nama rakyat, namun tujuan utamanya untuk mendapatkan anggaran pembinaan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Kemunculan akan LSM fiktif juga merupakan permasalahan yang sangat serius ditingkat daerah. Hal ini senada dengan yang disampaikan Tabrani Rab (Ihsan Yus, 2000: 100-101) bahwa orang banyak tertarik untuk mendirikan LSM fiktif dengan merancang kegiatan-kegiatan yang juga fiktif. Ribut Susanto (Ihsan Yus, 2000: 99), pendiri LSM Riau Mandiri memandang gelagat LSM pada akhir-akhir mulai mempertanyakan aktivitas dari keberadaan LSM yang sudah banyak melenceng dari idealisme, keterpanggilan dan moral sebagai dasar keberadaan

suatu LSM yang hakiki. Hal ini tentu saja membuka peluang terjadinya penyalahgunaan institusi LSM untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek yang sempit dan bahkan bisa merugikan orang lain termasuk pencemaran nama baik LSM lain.

Selanjutnya beberapa LSM menunjukkan sifat ketidak-profesionalannya dalam menjalankan program demi tercapainya tujuan LSM tersebut didirikan. T. Khalil Jafar (<http://www.riauterkini.com> diakses tanggal 24 Februari 2012) menyatakan bahwa LSM di Provinsi Riau banyak yang tidak jelas keberadaan alamat kantornya. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Zulhelmi selaku Kepala Sub Bidang Fasilitasi Ormas dan LSM Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau bahwa ada kesulitan untuk melakukan penertiban dan pembinaan terhadap LSM karena beberapa LSM tidak memiliki alamat yang jelas dan benar, bahkan setelah memperoleh SKT dan dilakukan konfirmasi ulang ternyata alamat LSM tersebut tidak sesuai dengan data yang diberikan kepada pihak Badan Kesbangpolinmas.

Berbagai problematika yang melibatkan LSM – LSM lingkup provinsi di Provinsi Riau ini bisa saja memunculkan degradasi kepercayaan publik terhadap keberadaan LSM, karena sesungguhnya banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh LSM baik internal maupun eksternal. Dari sisi internal misalnya inefisiensi manajemen, pertikaian antar aktivis, transparansi dan sebagainya. Selain itu, Suryadi Culla (2006: 63) menyampaikan bahwa masalah sumber dana merupakan tantangan utama yang harus dihadapi LSM, dan sudah terlihat ditingkat nasional bahwa ada LSM yang memilih merubah arah ideologis sesuai dengan penyandang dananya. Hal ini menggambarkan kondisi LSM yang carut-marut, sehingga diperlukan adanya evaluasi atas kinerja LSM, baik dari LSM itu sendiri maupun Pemerintah. Fahmi Panimbang dalam tulisannya tentang LSM (<http://indoprogress.com> diakses pada tanggal 09 Maret 2012) menyebutkan bahwa banyak LSM yang malah berperan memperlemah gerakan rakyat dan melakukan kegiatan yang kontra-produktif.

Penyimpangan-penyimpangan perilaku LSM dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh LSM sebagaimana dipaparkan di atas, menunjukkan telah terjadi distorsi terhadap peran yang seharusnya dijalankan oleh LSM dalam pola relasinya dengan pemerintah dan masyarakat. Ada cukup banyak LSM lingkup Provinsi di Provinsi Riau dengan masing-masing ideologi, ruang lingkup kegiatan dan peranan yang berbeda-beda.

Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang bermaksud mencari fakta sebanyak-banyaknya untuk kemudian diambil suatu kesimpulan (Winarno Surakhmad, 1989: 143). Penulis menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti (Lexi J Moleong, 2000).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka untuk deskriptif analisis data disajikan dalam bentuk analisa.

- a. Data dikumpulkan melalui informan, key informan dan data dari lapangan. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis selanjutnya memisahkan dan mengelompokan data menurut jenisnya.
- b. Data yang didapat dilapangan dipadukan dengan data yang didapatkan melalui informan, kemudian ditarik kesimpulan akhir dari data-data tersebut.

Hasil Pembahasan

A. Peranan Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap LSM Lingkup Provinsi.

Salah satu peran Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau adalah melakukan pembinaan kepada LSM di Provinsi Riau. Pelaksanaan tugas pembinaan LSM yang di lakukan oleh Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau adalah inventarisir LSM dan pembinaan berupa bimbingan, pengayoman, dan dorongan yang dilakukan melalui forum–forum diskusi maupun seminar– seminar.

Bimbingan yang dilakukan dengan cara memberi saran, anjuran, petunjuk, pengarahan, dan penyuluhan agar LSM dapat menjalankan kegiatan, profesi dan fungsinya dengan baik. Pemberian pengayoman dapat dilakukan dengan memberi perlindungan, rasa aman dan kemudahan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan dorongan berupa upaya-upaya pemberian motivasi agar LSM dapat tumbuh secara mandiri dengan menumbuhkan kreativitas yang positif untuk dapat mengembangkan diri.

Selanjutnya pembinaan LSM dilaksanakan dalam bentuk komunikasi dan konsultasi secara timbal balik antara Pembina dengan LSM yang bersangkutan. Pelaksanaan komunikasi dan konsultasi dilakukan secara luwes baik atas inisiatif dari Pemerintah maupun dari LSM yang bersangkutan sesuai kebutuhan dan sejauh mungkin dapat meniadakan kendala-kendala yang menimbulkan kerugian kepentingan umum. Forum komunikasi dan konsultasi ini dapat berupa sarasehan, temu wicara, tatap muka silaturahmi, seminar dan sebagainya.

Berikut penulis sampaikan program kegiatan pembinaan LSM yang dilakukan oleh Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau;

Tabel 3.1
PROGRAM KEGIATAN PEMBINAAN LSM/ORMAS
TAHUN 2011

| NO. | KEGIATAN | TARGET | FREKUENSI |
|------------|---|--|------------------|
| 1. | Dialog pembangunan Provinsi Riau antara Ormas dan LSM dengan Pemerintah Provinsi Riau | Meningkatnya pemahaman Ormas dan LSM terhadap program-program pemerintah Provinsi Riau | 2 |
| 2. | Fasilitasi Perkembangan Ormas dan LSM Provinsi dan Kabupaten/Kota | a. Terhimpunnya data Ormas dan LSM. b. Tersedianya SKT bagi Ormas dan LSM di Provinsi Riau | 1 |
| 3. | Pembinaan Ormas dan LSM di Provinsi Riau dan Kab/Kota | Meningkatkan pengetahuan Pengurus/anggota Ormas dan LSM Lingkup Provinsi, Kab/Kota se- Provinsi Riau dalam menjalankan aktifitasnya. | 1 |

Sumber: Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau

B. Program Pembinaan Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkup Provinsi.

1. Inventarisasi

Program pembinaan yang pertama dilakukan adalah inventarisasi keberadaan LSM yang mempunyai lingkup kerja provinsi dan berada di Provinsi Riau. Inventarisasi LSM dilaksanakan untuk mendata jumlah LSM lingkup provinsi di Provinsi Riau. Berdasarkan data yang dimiliki Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau, hingga 2011, jumlah LSM lingkup provinsi yang berada di Provinsi Riau berjumlah 122 LSM.

Inventarisasi keberadaan LSM yang dilakukan oleh Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau, dilakukan terhadap LSM yang melaporkan keberadaannya kepada Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau. Inventarisasi yang dilakukan Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau berdasarkan Nama, status lembaga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau akte pendirian, susunan pengurus atau anggota organisasi, tujuan, dan program kegiatan LSM bersangkutan.

Proses inventarisasi merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau dalam menjalankan peran pembinaan. Inventarisasi ini dilakukan untuk memperoleh data keberadaan dan penyebaran LSM di daerah Provinsi Riau. Selanjutnya data tersebut sebagai bahan kajian untuk melihat sejauhmana perkembangan demokrasi di daerah Provinsi Riau berdasarkan jumlah LSM yang ada serta jenis kegiatan yang dilakukan oleh LSM-LSM tersebut. Selain hal-hal tersebut, inventarisasi atau pendataan terhadap LSM dimaksudkan untuk mengeluarkan legalitas berdirinya sebuah LSM. Legalitas ini berupa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang berlaku selama 3 (tiga) tahun.

2. Pembinaan

Setelah dilakukan pendataan, Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau melakukan pembinaan lanjutan. Pembinaan yang dilakukan Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau dapat berupa bimbingan, pengayoman dan dorongan. Bimbingan yang dilakukan dengan cara memberi saran, anjuran, petunjuk, pengarahan, dan penyuluhan agar LSM dapat menjalankan kegiatan, profesi dan fungsinya dengan baik. Pemberian pengayoman dapat dilakukan dengan memberi perlindungan, rasa aman dan kemudahan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan dorongan berupa upaya-upaya pemberian motivasi agar LSM dapat tumbuh secara mandiri dengan menumbuhkan kreativitas yang positif untuk dapat mengembangkan diri.

Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau dalam menjalankan peran pembinaan terhadap LSM melalui beberapa program kegiatan yang telah dicanangkan. Adapun program-program tersebut adalah:

a. Forum-Forum Diskusi Politik.

Program ini merupakan program kegiatan berupa seminar dengan mengundang LSM yang telah terdaftar dan mengundang beberapa pembicara yang mempunyai sudut pandang berbeda yaitu dari akdemisi, mantan aktifis LSM dan dari LSM itu sendiri agar dapat mengkaji beberapa permasalahan dari berbagai sudut pandang sehingga dapat menghasilkan sebuah solusi. Dialog ini juga

sebagai peningkatan pemahaman LSM terhadap program-program yang akan dilakukan pemerintah daerah Provinsi Riau.

Hasil wawancara dengan Bapak Daswanto menunjukkan bahwa Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau berperan sebagai fasilitator pemberdayaan LSM agar LSM dapat menjalankan peranannya dengan baik di tengah-tengah masyarakat Provinsi Riau. Melalui forum ini, fungsionaris LSM yang hadir akan memperoleh pemahaman yang lebih tentang menjalankan roda organisasi secara swadaya serta dapat masukan-masukan yang berarti dari berbagai nara sumber dan materi-materi yang telah disiapkan.

b. Pembinaan Kepada LSM di Provinsi Riau.

Peran pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau yaitu peranan sebagai konsultan LSM yang mempunyai permasalahan baik dalam segi menjalankan roda kepengurusan organisasi dan juga dalam hal menjalankan program kerja LSM tersebut. Peranan ini muncul apabila dibutuhkan oleh LSM itu sendiri.

Berikut penulis sampaikan hasil wawancara dengan Ibu Zulhelmi:

“selain pembinaan dalam bentuk seminar, kami juga membuka diri apabila ada LSM yang ingin berkonsultasi kepada kami. Karena peranan itu juga terdapat dalam Inmendagri. Biasanya yang datang itu LSM-LSM yang baru berdiri. Kemarin ada salah satu pengurus LSM yang curhat kepada saya karena ada perselisihan dengan sesama pengurus. Ya, saya berkewajiban untuk mendengarkan dan memberikan solusi untuk masalahnya tersebut.” (*Wawancara Pada Tanggal 26 November 2012*)

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Daswanto selaku Kepala Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau.

“kita memang masih kekurangan tenaga profesional, ini dikarenakan staf belum diberikan pelatihan tentang pemahaman tentang Ormas dan LSM. Yang saya pelajari selama ini, ternyata banyak pegawai yang tidak dapat pembagian kerja. Mereka jadi sibuk dengan diri mereka sendiri. Saat ada tamu yang datang jadi merasa diabaikan.” (*Wawancara Pada Tanggal 11 September 2012*)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa staf yang diperbantukan dalam melakukan proses pembinaan terhadap LSM masih memiliki kemampuan di bawah kebutuhan. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran mereka dalam memaksimalkan kinerja. Pegawai-pegawai yang ada pada Sub Bidang Fasilitasi Ormas dan LSM Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat tidak memiliki wawasan serta pemahaman yang cukup tentang tugas dan fungsi yang mereka jalani.

C. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Peran Pembinaan

Dalam pelaksanaan peran Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau dalam melakukan pembinaan terhadap LSM lingkup provinsi di Provinsi Riau ini tentunya memiliki hambatan – hambatan sehingga peranan tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, ada beberapa faktor penghambat pelaksanaan peranan tersebut, sebagai berikut:

1. Kurangnya Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses penanaman atau transfer nilai dari pihak pertama kepada pihak kedua. Sosialisasi ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kurangnya sosialisasi peraturan tentang LSM menjadi faktor penghambat dalam melakukan peran pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau kepada LSM lingkup provinsi. Hal ini berakibat kepada kurangnya pemahaman LSM terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemandekan sosialisasi peraturan ini menjadikan LSM tidak memahami hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan peranannya ditengah-tengah masyarakat.

2. Proses Pendaftaran yang Rumit

Sebagian LSM yang belum mendaftarkan diri kepada Badan Kesbangpolinmas Provinsi merasa bahwa proses dalam melakukan pendaftaran kepada Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau harus melalui proses yang rumit. Kerumitan yang dialami terkait banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh LSM dalam memperoleh SKT. Hal ini membuat LSM enggan mengurus SKT.

3. Regulasi

Regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum.

Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau dalam melakukan pembinaan terhadap LSM terbentur pada peraturan perundang-undangan yang sudah tidak bisa dijadikan sebagai patokan dalam kondisi kekinian. Undang-undang yang ada hanya mengatur tentang hak dan kewajiban LSM. Untuk LSM yang melanggar aturan tersebut, tidak ada sanksi tegas yang dapat diberikan karena peraturan perundang-undangan tidak membuat itu secara jelas. Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau hanya dapat memberikan saran, anjuran dan masukan-masukan bagi LSM yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara dengan Ibu Zulhelmi:

“menjalankan peran pembinaan kepada LSM itu tidak selalu semulus yang kita bayangkan. LSM didirikan oleh orang yang punya latar belakang beda. Siapapun bisa membuat LSM. 3 (tiga) orang saja bisa buat LSM. Bahkan ada beberapa LSM yang pengurusnya itu-itu saja, hanya jabatannya saja yang ditukar. Ada juga LSM yang berbuat diluar dari fungsinya. LSM itu kan seharusnya melaporkan kegiatannya kepada kesbang, namun dari sekian banyak yang mendaftar itu, tidak lebih dari 50% yang melaporkan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena diperaturan yang ada, tidak ada pemberian sanksi yang jelas. Yang bisa kami berikan ya berupa himbauan.” (*Wawancara Pada Tanggal 26 November 2012*)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa regulasi/peraturan yang ada tidak memuat sanksi kepada LSM yang tidak taat kepada peraturan yang telah

dibuat pemerintah. Ini tentunya akan menghambat pelaksanaan pembinaan kepada LSM.

4. Sumber Daya Manusia

SDM merupakan faktor sentral dalam pengelolaan suatu organisasi. Mereka yang menjadi penggerak roda organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Karena itu, produktivitas Organisasi sangat ditentukan oleh produktivitas SDM yang bersangkutan.

Kendala lain yang dihadapi oleh Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau adalah kurangnya sumber daya manusia dalam menjalankan peran dan fungsi Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau dalam melakukan pembinaan terhadap LSM lingkup Provinsi. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang LSM atau Organisasi yang dimiliki oleh pegawai Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau terutama yang berada di Sub Bidang Fasilitasi Ormas dan LSM. Total staf yang diperbantukan pada Sub Bidang Fasilitasi Ormas dan LSM hanya berjumlah 5 (lima) orang. Selain jumlah, kemampuan yang dimiliki oleh staf tersebut sangat terbatas. Hal ini terungkap dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Bidang Fasilitasi Ormas dan LSM, berikut hasil wawancara dengan beliau.

“..kendala yang Ibu hadapi berkaitan dengan jumlah staf. Ibu hanya memiliki 5 orang staf. Sebenarnya itu belum cukup untuk membantu mengurus LSM yang totalnya hingga ratusan. Skill dari staf tersebut juga kurang. Mereka kurang pandai dalam mengecek list persyaratan yang ada. Seharusnya juga ada skill profesional di bidang data aplikasi...”
(*Wawancara Pada Tanggal 26 November 2012*)

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Daswanto selaku Kepala Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau.

“kita memang masih kekurangan tenaga profesional, ini dikarenakan staf belum diberikan pelatihan tentang pemahaman tentang Ormas dan LSM. Yang saya pelajari selama ini, ternyata banyak pegawai yang tidak dapat pembagian kerja. Mereka jadi sibuk dengan diri mereka sendiri. Saat ada tamu yang datang jadi merasa diabaikan.” (*Wawancara Pada Tanggal 11 September 2012*)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa staf yang diperbantukan dalam melakukan proses pembinaan terhadap LSM masih memiliki kemampuan di bawah kebutuhan. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran mereka dalam memaksimalkan kinerja. Pegawai-pegawai yang ada pada Sub Bidang Fasilitasi Ormas dan LSM Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat tidak memiliki wawasan serta pemahaman yang cukup tentang tugas dan fungsi yang mereka jalani.

5. Fasilitas Belum Memadai (Infrastruktur)

Infrastruktur merupakan kebutuhan setiap organisasi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok. Sesuai dengan tugas pokok serta peranan pembinaan terhadap LSM, Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau seyogyanya harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Saat ini, Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau belum mempunyai aplikasi pendukung dalam menyusun data

keberadaan LSM. Aplikasi pendukung tersebut dimaksudkan sebagai penunjang tugas Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau dalam melakukan koordinasi dengan Badan Kesbangpolinmas Kabupaten/Kota maupun dengan pemerintah daerah Provinsi Riau.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Ibu Zulhelmi:

“kami juga membutuhkan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pembinaan kepada LSM. Sekarang ini kami hanya punya 2 unit komputer. Kami juga butuh aplikasi pendukung agar data yang kami input bisa dilihat secara *online*, itukan bisa mempermudah kami dalam melakukan koordinasi kepada Dinas-dinas lain yang membutuhkan data tentang LSM.” (*Wawancara Pada Tanggal 26 November 2012*)

Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau mempunyai harapan untuk segera memiliki aplikasi pendukung tersebut untuk mempermudah tugas yang diemban. Dengan adanya aplikasi ini, Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau akan lebih mudah untuk menginput data LSM dan data yang telah di Input tersebut dapat dibuka oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau secara *online* guna mempermudah pelaporan mengingat tanggungjawab Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau kepada Gubernur Provinsi Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Peranan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau dalam melakukan pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat lingkup Provinsi di Provinsi Riau berupa bimbingan, pengayoman, dan dorongan yang dilakukan melalui forum – forum diskusi maupun seminar – seminar.
2. Program pembinaan tersebut meliputi inventarisasi keberadaan LSM yang mempunyai lingkup kerja provinsi dan berada di Provinsi Riau, Setelah dilakukan pendataan, Badan Kesbangpolinmas Provinsi Riau melakukan pembinaan lanjutan. Bimbingan yang dilakukan dengan cara memberi saran, anjuran, petunjuk, pengarahan, dan penyuluhan agar LSM dapat menjalankan kegiatan, profesi dan fungsinya dengan baik.
3. Didalam menjalankan perannya melaksanakan pembinaan terhadap LSM, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau juga mendapatkan beberapa hambatan. Adapun Faktor-faktor penghambat tersebut meliputi:
 - a. Kurangnya sosialisasi.
 - b. Proses pendaftaran yang rumit.
 - c. Regulasi.
 - d. Sumber Daya Manusia (SDM).
 - e. Fasilitas belum memadai (infrastruktur).

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi yang intens dan optimal dari Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau kepada LSM khususnya pada saat akan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan LSM tersebut.
2. Perlu adanya optimalisasi layanan informasi dari Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau seperti memanfaatkan media online sebagai sarana informasi maupun registrasi LSM.
3. Perlu adanya update regulasi, minimal merumuskan kembali SOP khusus mengenai LSM di Provinsi Riau baik itu hak, kewajiban, maupun sanksi yang akan diberikan pada saat melanggar hak dan kewajibannya.

Daftar Pustaka

- Adi Suryadi Culla, 2006. *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Ihsan Yus, 2000. *Dari Gerakan Pembelaan Menuju Pemberdayaan: Peran LSM Riau Mengembangkan Kapasitas Masyarakat*. Pekanbaru: Bahana Press.
- Lexi J Moleong, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maruto MD dan Anwari WMK (ed.), 2002. *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*, Jakarta: LP3ES.
- Muhammad Budairi. 2002. *Masyarakat Sipil dan Demokrasi: Dialektika Negara dan LSM Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum*. Jakarta: E-Law Indonesia.
- Riza N. Arfani, 1996. *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surakhmad, W. 1989. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Tim ICCE UIN Jakarta, 2003. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Veithzal Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Widodo, 2004. *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian: Skripsi Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Yayasan Kelopak-Magna Script.